

# FAKTOR TERJADINYA KONFLIK PERBATASAN DI RAS DOUMEIRA ANTARA ERITREA – DJIBOUTI (2008-2010)

Oleh

Achmady Sophiaan

NIM. 20140510099

## ABSTRAK

Penelitian ini dibuat bertujuan untuk mengkaji dan mengidentifikasi faktor apa saja yang menyebabkan konflik di perbatasan antara Eritrea dengan Djibouti pada tahun 2008-2010 di Ras Doumeira. Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian pustaka (*Library research*) dengan mengumpulkan data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-historis, antara Eritrea dengan Djibouti. Kedua negara memegang peran dalam terjadinya konflik di Ras Doumeira, dimana Eritrea merupakan negara dengan sistem otoriter di bawah rezim Isaias Afewerki yang militeristik. Sedangkan Djibouti dengan keuntungan letak geografis yang strategis memanfaatkannya untuk menjalin kerjasama militer dengan negara-negara kuat seperti Amerika Serikat, Perancis, China dan lainnya. Secara tidak langsung tindakan atau keadaan domestik kedua negara membuat dilema keamanan diantaranya. Hal tersebut diperparah dengan belum jelasnya status dari Ras Doumeira.

**Kata Kunci :** Eritrea, Djibouti, tanduk afrika, konflik perbatasan, *security dilemma*.

---

### I. PENDAHULUAN

Eritrea dan Djibouti merupakan dua negara kecil yang terletak di kawasan Afrika Timur dengan total garis perbatasan sepanjang 110 km (Mesfin, 2008). Terletak di timur benua Afrika yang berhadapan langsung dengan laut Merah dan Teluk Aden. Kedua negara ini merupakan bekas wilayah kolonial bangsa Eropa yaitu, kolonial Italia yang sekarang menjadi wilayah Eritrea dan kolonial Perancis yang sekarang menjadi wilayah kedaulatan Djibouti. Kedua negara ini terletak di kawasan Tanduk Afrika atau *Horn of Africa*.

Tanduk Afrika merupakan sub-regional dari kawasan Afrika Timur yang membentang dari Eritrea di utara sampai Mozambique di selatan.

Tanduk Afrika (*Horn of Africa*) sendiri merupakan istilah yang mengacu pada subkawasan di Afrika Timur, terdiri dari empat negara yakni, Ethiopia, Eritrea, Djibouti dan Somalia. Tanduk Afrika (*Horn of Africa* = HOA) atau Timur Laut Afrika atau Semenanjung Somali merupakan semenanjung di Afrika Timur yang menjorok beberapa ratus kilometer ke laut Arab dan terletak di sebelah barat teluk Aden (Jatmika, 2016, hal. 63).

Dalam perkembangan politik pemerintahannya hubungan Eritrea dengan Djibouti cenderung naik-turun, dimulai pada tahun 1996 terjadi konflik pertama yang melibatkan pasukan militer antara kedua belah pihak baik Eritrea maupun Djibouti. Kedua belah pihak hampir terlibat dalam perang ketika otoritas Djibouti mengklaim bahwa pihak Eritrea telah masuk ke sebuah desa suku Afar yang masuk kedalam wilayah administrasi Djibouti serta mengklaim bahwa pihak Eritrea telah menerbitkan sebuah peta baru yang memasukan desa tersebut kedalam peta nasional Eritrea. Namun pihak Eritrea membantah tuduhan yang diberikan oleh Djibouti terkait insiden tersebut serta pengklaiman wilayah kedaulatan Djibouti.

Krisis tersebut mereda setelah pasukan perbatasan Eritrea ditarik mundur dari daerah sengketa dan pihak Djibouti menarik kembali tuduhan tersebut pada bulan Mei 1996. Namun pada tahun 2008 konflik kembali terjadi antara kedua negara tersebut dan terpusat di wilayah perbatasan antara keduanya tepatnya di semenanjung Doumeira dan terjadi adu senjata di kedua belah pihak dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan korban luka-luka yang datanya tidak akurat.

Pada konflik kedua ini Djibouti kembali menuduh pihak Eritrea karena telah diduga menggali sebuah parit dan menempatkan pasukan perbatasan di wilayah konflik. Pada bulan Juni 2008 konflik mulai memuncak ketika ada beberapa tentara perbatasan Eritrea yang memasuki wilayah kedaulatan Djibouti tidak kembali lagi ke

Eritrea. Dunia internasional tidak berdiam saja, Amerika Serikat mengecam tindakan yang dilakukan oleh pasukan Eritrea di Ras Doumeira yang mengakibatkan terjadi kembali konflik antara Eritrea dengan Djibouti. Begitu pula dengan Perancis dimana sebagai negara bekas koloninya memberika bantuan kesehatan dan tenaga medis, logistik dan pasukan intelejen.

Konflik mulai mereda setelah beberapa hari pasca konflik berlangsung, namun tensi antara kedua negara masih dalam keadaan tidak stabil. Dewan keamanan PBB mengatakan bahwa pada tahun 2009 Eritrea tidak menarik mundur pasukan perbatasannya dari wilayah yang disengketakan dan pada tahun 2010 pasukan perdamaian Qatar mulai memasuki Ras Doumeira dan menawarkan untuk menjadi mediator bagi kedua belah pihak dan diterima dengan baik oleh keduanya.

Ras Doumeira sendiri merupakan sebuah wilayah yang terletak di perbatasan antara Eritrea dengan Djibouti dengan kondisi alam yang sangat tandus dan kering karena terletak di gurun Danakil. Selain itu Ras Doumeira juga terletak di selat Bab el Mandeb yang merupakan bagian dari jalur perdagangan internasional menghubungkan terusan Suez – laut Merah dengan teluk Aden – laut Arab. Wilayah ini terdiri dari sebuah semenanjung yang terbagi menjadi dua bagian wilayah Eritrea di utara dan Djibouti di selatan serta dua pulau yang samapi sekarang masih menjadi wilayah sengketa. Peta lokasi Ras Doumeira dapat dilihat pada gambar 1.1.

**Gambar 1.**  
**Peta Ras Doumeira**



Sumber: BBC News

<http://www.bbc.com/news/world-africa-40340210>

diakses pada tanggal 09 April 2017

Wilayah Ras Doumeira sendiri hanya memiliki luas wilayah seluas 1.29 km<sup>2</sup> (0.50 sq mi) dengan titik poin tertingginya setinggi 44 Meter (144 ft) yang merupakan sebuah bukit di ujung semenanjung wilayah ini dan dihuni oleh etnis Afar. Secara kondisi alam Ras Doumeira tidak memiliki potensi alam yang dapat dijadikan komoditas ekspor. Kondisi alam yang sangat tandus dan cuaca yang sangat panas serta kontur tanah yang keras dan berbatu tidak dapat di tumbuhi tanam-tanaman. Walaupun wilayah ini tidak memiliki keuntungan sumber daya alam namun menjadi wilayah sengketa yang diperebutkan oleh kedua negara.

## II. KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam mengidentifikasi dan menganalisa penelitian ini penulis menggunakan sebuah teori dan satu konsep yaitu teori sebab munculnya konflik dan konsep *security dilemma*.

### 1. Teori Sebab Munculnya Konflik

Konflik merupakan salah satu fenomena yang ada dalam hubungan internasional dan merupakan hal yang penting dalam kehidupan bernegara pada setiap tingkat interaksi salah satunya adalah konflik internasional (Bar-Tal). Secara tradisional istilah konflik internasional mengacu pada konflik antar negara bangsa atau konflik organisasi internasional ataupun individu dengan sebuah negara. Dimana menurut beberapa ahli konflik dapat dijabarkan sebagai berikut;

menurut James W. Vander Zanden dimana konflik diartikan sebagai suatu pertentangan mengenai nilai atau tuntutan, hak atas kekayaan, kekuasaan, status atau suatu wilayah. Dengan tujuan untuk menetralkan, merugikan ataupun menyisihkan lawan mereka (Setiawan, 2016). Dari dua pendapat para ahli tersebut penulis mencoba merangkum bahwa konflik merupakan sebuah perdebatan atau persaingan untuk memenangkan sesuatu karena adanya ketidaksetujuan terhadap sesuatu, argumentasi atau fakta yang ada.

Konflik hadir ketika dua atau lebih pihak menganggap bahwa kepentingan mereka tidak sesuai, mengekspresikan sikap bermusuhan, atau mengambil kepentingan mereka melalui tindakan yang dapat merusak pihak lain. Negara yang berkonflik pada umumnya memiliki kepentingan akan upaya mengelola sumber daya baik berupa wilayah, uang, sumber energi, makanan dan bagaimana mereka harus didistribusikan. Hasrat untuk berkuasa, bagaimana kontrol dan partisipasi dalam pengambilan keputusan politik dialokasikan. Upaya mempertahankan atau

melindungi identitas, mengenai komunitas budaya, sosial dan politik dimana orang merasa terikat. status, apakah orang percaya diperlakukan dengan hormat dan bermartabat dan apakah tradisi dan posisi sosial mereka dihormati. Nilai lebih, terutama yang terkandung dalam sistem pemerintahan, agama, atau ideologi.

Sumber konflik berasal dari hubungan antara sistem negara-kebangsaan yang dilandasi oleh konsep "egocentrisme", yaitu aspirasi untuk mempertahankan dan meningkatkan kekuatan serta kedudukan negara dalam hubungannya dengan negara lain. Bila suatu negara terlalu berpegang teguh kepada pengakuan universal atas kemerdekaan politiknya dan kebebasan memilih serta bertindak, ia akan menemui dilemma karena ia pun harus menghormati kebebasan dan kemerdekaan yang sama dari setiap negara lain. Akan tetapi sebenarnya tidak ada negara satu pun yang bisa mempercayai negara lain, artinya keselamatan negara tergantung kepada usaha-usaha sendiri, karena itu setiap negara harus bersikap hati-hati dalam memelihara hubungan dengan negara lain. (Nasution, 1991, hal. 53)

Menurut R.J. Rummel dalam *Understanding Conflict and War: Vol. 4: War, Power, Peace* memaparkan penyebab umum perilaku konflik, antara lain adalah adanya upaya menentang kepentingan dan kemampuan karena ada perbedaan atau persamaan dalam sosiokultural yang spesifik diantara pihak, dan adanya *awareness* karena

adanya perubahan yang significant dalam keseimbangan kekuatan.

Selain penyebab umum perilaku konflik dapat diperburuk oleh beberapa sebab yakni, Pertama, setidaknya satu partai yang memiliki rezim otoriter atau totaliter, dalam kaitannya dengan konflik rezim partai otoriter dapat menghalangi pihak lain yang menghasilkan kegagalan pencapaian tujuan pihak lain. Dalam kasus konflik ini pemerintah Eritrea adalah sebuah rezim otoriter di bawah kendali Presiden Isaias Afwerki. *The People's Front for Democracy and Justice Front* (PFDJ), dipimpin oleh Presiden Afwerki, adalah satu-satunya partai politik di Eritrea. PFDJ telah menguasai negara tersebut sejak tahun 1991 yang sebelumnya merupakan gerakan atau front pembebasan rakyat Eritrea atau *Eritrean Liberation Front*. Pemilu tidak dilakukan sejak negara tersebut merdeka dari Ethiopia pada tahun 1993 (State, 2018).

Serta adanya gangguan *status quo* (keadaan yang ada) dimana dalam istilah bahasa Latin berasal dari kalimat *In statu quo res erant ante bellum* (keadaan sebagaimana ketika belum terjadi peperangan), dalam kasus konflik antara Eritrea dan Djibouti gangguan *status quo* dikarenakan adanya perbedaan prinsip dalam penempatan daerah perbatasan diantara kedua belah pihak yang menyebabkan kedua belah pihak berkonflik.

## 2. Konsep Security Dilemma

Dalam ilmu hubungan internasional *security dilemma* merupakan salah satu konsep dalam teori realisme yang muncul akibat dari

adanya upaya suatu negara dalam meningkatkan sistem pertahanan dan keamanan negaranya, seperti meningkatkan kekuatan militer atau pun membentuk aliansi dengan negara lain. namun disisi lain menimbulkan reaksi dari negara lain terutama negara tetangga disekitarnya yang juga ingin meningkatkan keamanannya yang pada akhirnya menyebabkan penurunan keamanan di kedua negara (Jervis, 1978).

Sedangkan menurut John H. Herz mendefinisikan *security dilemma* sebagai gagasan struktural dengan usaha-usaha yang diambil sebuah negara untuk menjaga kebutuhan keamanan (kedaulatan) negaranya, terlepas dari apapun tujuannya, tindakan meningkatkan struktur pertahanan dapat memicu ketidaknyamanan bagi negara di sekitarnya. Oleh sebab itu negara-negara disekitarnya juga berusaha bersaing dalam meningkatkan struktur pertahanannya akibat merasa terancam dan diharuskan meningkatkan struktur keamanannya yang bersifat defensif (Herz, 1950).

Sebelumnya juga dibahas *security dilemma* mampu memaksa negara dalam menjaga kedaulatan keamanan negaranya melakukan kerjasama atau aliansi dengan negara yang memiliki power yang lebih kuat. Jika tindakan ofensif atau keadaan dimana negara dalam keadaan siap siaga dalam menghadapi militer negaranya dianggap kurang menguntungkan, maka pembentukan aliansi bisa menjadi alternatif yang menuntungkan (Jervis, 1978).

Di bawah dilema keamanan terdapat dua alasan mengapa aliansi terbentuk. Pertama, sebuah negara yang kurang puas dengan tingkat keamanannya akan cenderung memiliki beragam bentuk aliansi untuk mendukung dan memperbesar tingkat keamanannya. Kedua, sebuah negara ragu dengan kekuatan aliansi yang ia miliki saat ini mampu membantunya jika terjadi ancaman, oleh karena itu ia memutuskan untuk membentuk aliansi baru dengan negara lain (Christensen & Snyder, 1990).

Adanya *Security Dilemma* dalam kasus konflik antara Eritrea dengan Djibouti di Ras Doumeira membuat terjadi eskalasi konflik pada tahun 2008 dimana pihak Eritrea merasa terancam terlebih sebelumnya hubungan Eritrea dengan Djibouti tidak harmonis akibat adanya perbedaan dalam menenpatkan garis demarkasi di Ras Doumeira dan merasa terancam serta memulai menggali parit dan membangun pangkalan militer di garis terdepan perbatasannya dengan Djibouti yang berada di Ras Doumeira akibat dari terus meningkatnya pangkalan militer asing yang dibangun di Djibouti.

Amerika Serikat (AS) merupakan negara kedua yang membangun pangkalan militer di Djibouti setelah Perancis. AS memiliki pangkalan permanen militer terbesar di Djibouti yang bernama Camp Lemonnier. Pangkalan militer tersebut merupakan bekas pangkalan militer Perancis yang kemudian disewakan ke AS. Pangkalan militer ini dapat menampung setidaknya 4.000 personel militer sejak tahun 2001. Selain AS ada pula beberapa

negara besar yang memiliki pangkalan militer di Djibouti. Salah satunya adalah bekas negara yang menjajah Djibouti yakni, Prancis yang memiliki pasukan sekitar 1.500–1.700 prajurit dan telah menandatangani persetujuan kerja sama dengan Djibouti sejak 2003 (Wisnu, 2017).

Hal tersebut berbanding terbalik dengan Eritrea yang tidak satupun memiliki pangkalan militer asing yang berada di wilayahnya. Dan diperparah dengan kondisi dalam negeri yang dipimpin oleh regim partai yang otoriter yang dipimpin oleh Isaias Afewerki yang sekaligus merangkap sebagai kepala negara Eritrea.

### III. PEMBAHASAN

#### ANALISA FAKTOR TERJADINYA KONFLIK PERBATASAN ANTARA ERITREA DENGAN DJIBOUTI

Konflik yang terjadi di Ras Doumeira perbatasan antaran Eritrea dengan Djibouti merupakan masalah keamanan yang masih terjadi dan belum terselesaikan sampai saat ini. Dalam konflik tersebut tentu banyak menyita banyak perhatian dari dunia internasional, dimana dalam konflik ini kedua negara tetap bersikeras dalam merebut wilayah yang luasnya hanya sekitar 1.29 km<sup>2</sup>.

Serta adanya *security dilemma* yang terjadi antara kedua negara diantaranya adalah Djibouti merasa terancam karena berada di wilayah rawan konflik dimana salah satu tetangganya merupakan negara yang otoriter yang sangat berorientasi dengan militer. Sedangkan pihak Eritrea merasa terancam dengan keberadaan basis-basis militer yang

semakin marak dibangun di Djibouti. Serta masih belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak dalam menentukan garis batas perbatasan antara keduanya.

#### A. Pemerintah Eritrea yang Otoriter Di Bawah Kendali Rezim Isaias Afewerki

Pemerintah Eritrea merupakan rezim otoriter di bawah kendali satu-satunya partai politik di negara tersebut yaitu *The People's Front for Democracy and Justice* (PFDJ), dan dipimpin oleh presiden Afewerki. PFDJ telah mengendalikan Eritrea sejak tahun 1991, yang sebelumnya merupakan sebuah gerakan pembebasan rakyat Eritrea atau *The Eritrean People's Liberation Front* (EPLF).

Sejak pengangkatannya pada tahun 1993, Presiden Afwerki telah menjadi kepala legislatif (*the Transitional National Assembly*) dan eksekutif (dewan negara). Dengan demikian tidak ada pemisahan kekuasaan antara legislatif dengan eksekutif. Para anggota Majelis Nasional Peralihan secara langsung ditunjuk pada tahun 1997 untuk berfungsi sebagai legislatif setelah ratifikasi Konstitusi sampai pemilihan Majelis Nasional. Namun, pemilihan yang dijadwalkan untuk tahun 2001 telah ditunda tanpa batas. Dengan demikian, Majelis ini menjadi parlemen transisi sejak 1997.

Tidak adanya demokrasi, serta penyelenggaraan pemilihan presiden dan parlemen telah ditunda tanpa batas, membuat presiden Afwerki dan satu-satunya partai politik di Eritrea (PFDJ), terus mendominasi politik di Eritrea. Menjadikan tingkat

ketidakpuasan penduduk dengan rezim meningkat. Serta diperparah oleh kurangnya lapangan pekerjaan, layanan militer yang panjang dan ketidakstabilan ketersediaan pasokan makanan, membuat banyak warga Eritrea memilih untuk mencari suaka keluar negeri. Banyak diantara mereka merupakan golongan pengusaha dan anak muda yang memiliki potensi.

Bagi Rezim Isaias keberangkatan anak muda dan warga negaranya yang tidak puas dengan rezim merupakan jalan keluar bagi pemerintah Isaias untuk mengurangi risiko kerusuhan domestik, dan pada saat yang sama menyediakan penghasilan bagi devisa negara dengan “*diaspora taxes*” atau pajak para diaspora yang mengirim uang dalam bentuk mata uang asing dari luar negeri. (Zaken, 2017)

Selama dua dekade terakhir sejak kemerdekaannya pada 1991, kebijakan luar negeri Eritrea telah ditandai oleh konflik dan konfrontasi. Yang menyebabkan banyak terjadi masalah baik dalam negeri maupun luar negeri. Seperti masalah hubungan dengan semua negara tetangga Eritrea dimana, ada tiga negara yang berbatasan langsung di darat dan satu negara berbagi perbatasan di perairan dengan Eritrea mengalami permasalahan perbatasan yang mengakibatkan hubungan antara Eritrea dengan negara-negara tersebut menjadi tidak harmonis termasuk konflik dengan Ethiopia dan Djibouti.

Demikian juga, hubungan di kancah internasional juga mengalami ketegangan, dimana pada tahun 1990-an hubungan Eritrea

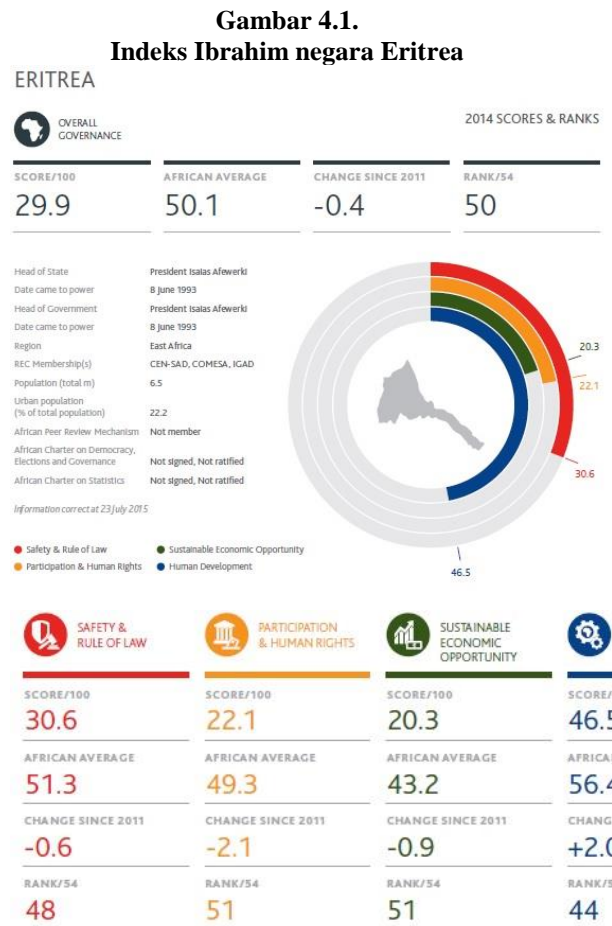
dengan Amerika Serikat telah membeku sejak pecahnya konflik di perbatasan Eritrea dengan Ethiopia pada tahun 1998. Hubungan Eritrea dengan PBB, Uni Afrika dan Uni Eropa juga mengalami keterpurukan akibat dari rezim Isaias yang tidak mau menyelesaikan masalah dengan damai.

Ada laporan yang konsisten dan terus-menerus tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Eritrea. Seperti adanya kerja paksa dengan durasi tak terbatas melalui program layanan nasional wajib; dan pembatasan ketat kebebasan sipil termasuk kebebasan berbicara, pers, berkumpul, berserikat, dan beragama. Hak asasi manusia dan Kebebasan berpendapat di Eritrea sangat di batasi. Dalam hal pemerintahan yang demokratis, Eritrea secara konsisten ditempatkan pada peringkat terendah. Dalam indeks Ibrahim tahun 2011 tentang pemerintahan yang baik di Afrika, Eritrea menduduki peringkat ke-47 dari 53 negara yang ada di Afrika.

Dimana *the Ibrahim Index of African Governance* (IIAG) merupakan indeks yang diterbitkan setiap tahun dan memberikan ukuran statistik kinerja pemerintahan di setiap negara Afrika. Pemerintahan didefinisikan oleh Yayasan Mo Ibrahim sebagai penyediaan barang dan jasa politik, sosial dan ekonomi yang setiap warga negara berhak untuk mengharapkan dari negaranya, dan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kepada warganya.

Definisi dalam indeks Ibrahim difokuskan pada output dan hasil kebijakan. Kerangka

kerja tata kelola IIAG terdiri dari empat kategori: 1) Keselamatan & Aturan Hukum, 2) Partisipasi & Hak Asasi Manusia, 3) Peluang Ekonomi Berkelanjutan, dan 4) Perkembangan manusia. (Ibrahim, 2018)



Sumber : Mo Ibrahim Foundation  
[http://static.moibrahimfoundation.org/u/2015/10/02201346/18\\_Eritrea.pdf](http://static.moibrahimfoundation.org/u/2015/10/02201346/18_Eritrea.pdf)  
 diakses pada tanggal 30 Maret 2018

Pada grafik di atas didapati bahwa; Eritrea memiliki skors 30.6 dari 100 di sektor Keamanan dan Hukum. Keadaan keamanan dan hukum yang ada di Eritrea berada di bawah rata-rata negara-negara di Afrika. Skors tersebut sesuai dengan keadaan yang ada dan situasi yang ada di Eritrea dimana rezim Isaias sangat memegang kendali terutama dalam mengeluarkan aturan-aturan bagi warga negaranya. Sehingga keadaan keamanan dalam

negeri maupun regional menjadi tidak stabil. Keadaan keamanan Eritrea sangat diawasi oleh otoriter rezim Isaias, terutama di sepanjang wilayah perbatasan Eritrea merupakan wilayah yang tidak aman dan berbahaya.

Partisipasi & Hak Asasi Manusia, mendapatkan skors 22.1 dari 100 serta di bawah rata-rata negara-negara Afrika yakni 49.3. Partisipasi yang dimaksud dalam indeks Ibrahim adalah partisipasi warga negara dalam bidang politik dan urusan pemerintahan. Dalam bidang politik warga negara Eritrea tidak memiliki hak suaranya dalam memilih pemimpin, dimana pemilu yang pernah diadakan dinegara ini hanya terjadi sekali ketika partai PFDJ menyalonkan Isaias Afewerki menjadi pemimpin negara tersebut. Dan pemilu tidak diadakan kembali setelahnya.

Sedangkan dalam bidang HAM Eritrea juga sangat rendah dimana semua hak-hak warga negara dibatasi oleh rezim Isaias. Dimana pada tahun 1996, Pemerintah Eritrea mengesahkan undang-undang yang mengharuskan semua jurnalis dan publikasi untuk dilisensikan oleh pemerintah. Mengumumkan bahwa semua organisasi media yang independen ditutup atau diawasi oleh rezimnya. Wartawan-wartawan dikumpulkan dan dimasukkan ke penjara. Keadaan kebebasan pers yang menyedihkan di negara Tanduk Afrika Eritrea telah berada di peringkat terbawah dari Indeks Kebebasan Pers (Gaffey, 2017). Skors tersebut pantas diberikan kepada pemerintahan Eritrea karena kurangnya kontribusi rakyatnya terhadap



politik pemerintahan negara tersebut serta gagalnya pemerintah Eritrea dalam memberikan hak-hak asasi manusia kepada warga negaranya.

Peluang Ekonomi Berkelanjutan, mendapatkan skors 20.3 dan dibawah rata-rata negara yang ada di Afrika yaitu 43.2 dari 100. Hal tersebut dikarenakan Eritrea belum sepenuhnya pulih dari pasca kemerdekaan serta diperparah dengan konflik yang terjadi dengan seluruh negara tetangganya yang memakan biaya militer dan pertahanan yang besar. Terlebih anggaran negara banyak difokuskan untuk pertahanan negara, selain itu investor asing juga enggan menanamkan investasi di negara tersebut karena kurang kondusifnya kestabilan keamanan di Eritrea.

Dan yang terakhir adalah *Human development* atau Perkembangan manusia, berbeda dengan ketiga faktor lainnya yang mendapatkan skors antara 20-30 saja, dalam faktor pembangunan manusia Eritrea mendapatkan nilai tertinggi dari faktor-faktor lainnya yaitu 46.5 walaupun masih dibawah rata-rata negara-negara di Afrika yakni 56.4. *Human development* sendiri merupakan sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar mampu memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup rata-rata angka harapan hidup dan kesehatan; pengetahuan dan kehidupan yang layak.

Dalam perkembangannya Eritrea terus membuat kemajuan dalam pembangunan manusia terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Misalnya, tingkat melek huruf warganya yang dapat membaca dan menulis meningkat dari 52,5% pada tahun 2002 menjadi 73,8% pada tahun 2015. Tingkat kematian anak dan probabilitas kematian dari 1.000 kelahiran mengalami penurunan dari 89,1 pada tahun 2000 menjadi 46,5 pada tahun 2015. Indikator lain yang menunjukkan peningkatan yang signifikan adalah: tingkat warga yang mendaftar untuk sekolah meningkat; kematian ibu menurun; dan maraknya kampanye kesehatan masyarakat. Kemajuan ini sangat penting untuk pelaksanaan agenda global untuk Pembangunan Berkelanjutan terutama tujuan memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua di semua usia, memastikan pendidikan berkualitas inklusif dan adil dan mempromosikan peluang belajar seumur hidup untuk semua. (Nyende & Mugisha, 2017)

Walapun adanya perbaikan terutama dalam bidang pembangunan manusia di Eritrea tetap saja rezim Isaias tersebut belum dapat membuat negara tersebut stabil, terutama dalam bidang keamanan baik keamanan domestik maupun regional. Terlebih dengan sistem pemerintahan yang otoriter dengan karakter militeristiknya membuat warga negaranya merasa dibatasi hak-haknya. Serta negara tetangganya terutama Djibouti merasa terancam karena ketidakstabilan domestik Eritrea dan belum selesainya konflik perbatasan di keduanya serta dalam Laporan

Pengawasan Hak Asasi Manusia pada tahun 2012 menggambarkan Eritrea sebagai salah satu negara paling represif dan tertutup di dunia.

## B. Meningkatnya Kerjasama Militer antara Djibouti dengan Asing

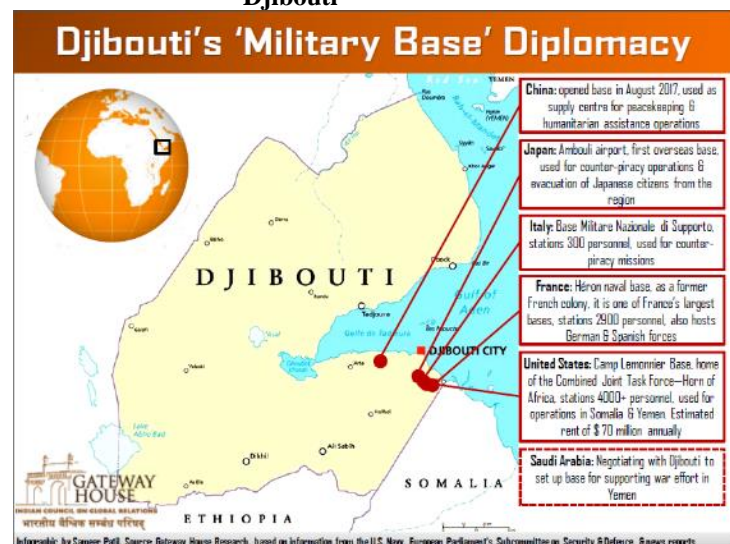
Djibouti merupakan negara kecil yang terletak di tanduk Afrika dan dikelilingi oleh negara-negara yang memiliki ketegangan baik domestik maupun internasional. Seperti Somalia yang merupakan *weak state* dimana otoritas pemerintahan Somalia tidak kuat dan berjalan dengan baik dan tidak mampu mengatasi masalah dalam negerinya seperti pemberontakan di laut Somali.

Serta Eritrea yang merupakan negara dengan sistem pemerintahan yang otoriter dan memiliki sejarah yang tidak baik dengan Djibouti terutama di sepanjang wilayah perbatasannya membuat Djibouti benar-benar dikepung oleh negara-negara yang bermasalah. Namun disisi lain letak geografis dari Djibouti yang berada jalur perdagangan internasional serta terletak di kawasan yang tidak stabil dalam keamanan seperti di Afrika Timur dan Timur tengah (Yaman) menjadikan banyak negara kuat seperti Amerika Serikat dan China mempunyai kepentingan di Djibouti.

Selain Amerika Serikat, ada pula negara-negara besar lainnya yang mendirikan basis pangkalan militernya di Djibouti antara lain adalah Perancis, Jepang dan Italia. Sedangkan China dan Arab Saudi masih dalam proses pembangunan. Serta ada pula pasukan militer

dari Rusia, Spanyol, Jerman, dan Inggris yang beroperasi di Djibouti. Karena dikuasai oleh kekuatan asing, pemerintah Djibouti mendapatkan banyak keuntungan dari adanya pangkalan militer asing tersebut antara lain pemerintah Djibouti setidaknya mendapatkan US\$ 300 juta per tahun dari setiap pangkalan yang ada di negaranya, serta mendapatkan jaminan perlindungan dan bantuan militer ketika negara tersebut mengalami kondisi bahaya atau mendapat tekanan dari negara-negara tetangganya. (Acheson, 2016)

**Gambar 4.2.**  
**Gambar Persebaran Pangkalan Militer di Djibouti**



Sumber : [http://www.gatewayhouse.in/wp-content/uploads/2017/10/SP\\_Djibouti---s---Military-Base---Diplomacy\\_Oct2017.pdf](http://www.gatewayhouse.in/wp-content/uploads/2017/10/SP_Djibouti---s---Military-Base---Diplomacy_Oct2017.pdf)  
diakses pada tanggal 31 Maret 2018

Djibouti yang memperoleh kemerdekaan dari Perancis pada tahun 1977 dan selama dua dekade berikutnya Perancis tetap menjadi kekuatan dominan di negara ini, telah membantu memberikan dana bagi pemerintah Djibouti, dan menjamin pertahanan negara sebagai ganti dari pembangunan pangkalan militer dan fasilitas pelatihan yang ekstensif,

sampai saat ini. Diperkirakan pasukan militer Prancis yang berbasis di Djibouti (atau FFDJ *Forces françaises stationnées à Djibouti*) sekitar 2.900 personel. *Naval base of Héron* atau pangkalan laut Prancis merupakan pangkalan terbesar yang dimiliki oleh Prancis dan sekaligus menjadi pangkalan militer bagi tentara Spanyol dan Jerman yang beroperasi di Djibouti.

Selanjutnya ada Camp Lemonnier yang merupakan basis pangkalan angkatan laut Amerika Serikat di Djibouti. Camp Lemonnier adalah satu-satunya pangkalan militer AS yang permanen di Afrika. (Whitlock, 2012) posisi pangkalan militer ini sangat strategis dimana terletak di kota Ambouli dan tepat berada di sisi selatan bandara internasional Djibouti-Ambouli. Sekitar 6.400 personel militer dan warga sipil Amerika Serikat berada di basis militer ini. Selain mendapat perlindungan dari militer AS, Djibouti mendapatkan uang sewa sebesar US\$ 70 juta setiap tahunnya dari sewa Camp Lemonnier ini.

Selanjutnya ada Jepang dan China yang memiliki pangkalan militer di Djibouti. Uniknyanya kedua negara tersebut baru memiliki pangkalan militer di luar wilayah negara dan terletak di Afrika. Jepang terlebih dahulu membangun pangkalan militer di Djibouti dengan sekitar 600 personel yang dikerahkan dari Pasukan Bela Diri Maritim Jepang. Jepang dilaporkan membayar US\$ 30 juta per tahun untuk fasilitas militer. (Styan, 2013) sedangkan China memulai kerjasama dengan Djibouti setelah adanya keputusan pada tahun

2008 untuk berpartisipasi dalam *Gulf of Aden counterpiracy operations*, Beijing semakin melibatkan militernya dalam mengejar kepentingan nasional China di wilayah tersebut. Pembentukan fasilitas dukungan militer ini menunjukkan bahwa Beijing melihat peran jangka panjang untuk militernya dalam melindungi kepentingan Cina di luar negeri.

Hubungan Tiongkok dan Djibouti telah menguat dalam beberapa tahun terakhir karena kedua negara memiliki ambisi ekonomi dan keamanan yang saling melengkapi. China menganggap Djibouti merupakan sebuah negara kecil yang terletak di kawasan tandus di Tanduk Afrika. China mencari peluang untuk memperluas kehadirannya di Afrika Timur untuk beberapa alasan. Secara khusus, Beijing memiliki kepentingan antara lain; Menemukan pasar baru di Afrika terutama dalam bidang. Meningkatkan kemampuan ekspedisi militer Tiongkok agar menjadi lebih baik menjaga warganya dan aset di wilayah tersebut. Serta mendukung ekonomi "*One Belt, One Road*" Presiden Xi Jinping. Kerjasama tersebut diperkuat dengan keadaan domestik Djibouti yang relatif stabil di wilayah yang tidak stabil, hal tersebut mempermudah China dalam melaksanakan kepentingannya di Djibouti.

Dengan maraknya basis militer asing yang ada di Djibouti tentu saja membuat negara tersebut mendapat berbagai keuntungan diantaranya adalah mendapatkan pendapatan dari hasil menyewakan tempat bagi militer asing yang otomatis tentu

menjaga kedaulatan negara Djibouti dari gangguan atau tekanan negara tetangganya, serta adanya transfer ilmu dan teknologi dari kerjasama militer antara Djibouti dengan negara-negara tersebut.

Djibouti telah berusaha memanfaatkan keuntungan geografinya untuk menghasilkan mata uang dengan menyewakan lahan ke beberapa militer asing. Djibouti bercita-cita menjadi pusat komersial seperti Singapura di Afrika Timur. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan perluasan infrastruktur secara dramatis.

Namun disisi lain negara Eritrea merasa terancam dengan keberadaan pangkalan militer asing yang berada di Djibouti. Kondisi tersebut merupakan *security dilemma* dimana keadaan ketika adanya peningkatan atau penurunan keamanan di suatu negara akan berpengaruh terhadap negara lainnya. Eritrea sendiri tidak memiliki basis militer asing yang ada di negaranya, bahkan sejak negara tersebut berjuang meraih kemerdekaannya, Eritrea tidak bekerjasama atau meminta bantuan asing.

Meskipun dalam komposisi penduduk dan anggaran belanja militer Eritrea lebih memadai daripada Djibouti, namun tetap saja keberadaan pangkalan asing di Djibouti membuat Eritrea terus meningkatkan kemampuannya dalam kekuatan militer. Salah satunya adalah melakukan wajib militer dengan durasi yang panjang. Djibouti dengan kemampuan militernya yang cenderung kecil berusaha untuk melindungi wilayahnya sebagai kepentingan mereka. Dan begitu pula

dengan Eritrea dengan kemampuan militer yang lebih besar berusaha melindungi Ras Doumeira sebagai bagian dari kepentingannya.

Kedua negara rela mengorbankan setiap kemampuan militernya untuk menjaga kepentingan mereka masing-masing. Eritrea kehilangan banyak hal dalam kemampuan militernya seperti berkurangnya personel militer, anggaran dan persenjataan demi kemenangan semu. Hal tersebut dikarenakan pada akhirnya Ras Doumeira juga tidak sepenuhnya berada dalam kontrol kedua negara. Disisi lain Djibouti berhasil mempertahankan status Ras Doumeira yang tetap menjadi wilayah *shared control*. (Siahaan, 2013)

#### IV. KESIMPULAN

Eritrea dan Djibouti merupakan dua negara serumpun yang terletak di Tanduk Afrika atau *Horn of Africa*, di timur Afrika dan memiliki total panjang perbatasan sepanjang 110 km. Dalam perkembangan politik pemerintahannya hubungan Eritrea dengan Djibouti cenderung naik turun, dimulai pada tahun 1996 terjadi konflik pertama yang melibatkan pasukan militer antara kedua belah pihak baik Eritrea maupun Djibouti. Konflik dipicu karena adanya tindakan provokatif dari Eritrea yang melakukan aktivitas militer di zona perbatasan kedua negara di Ras Doumeira.

Ras Doumeira sendiri merupakan wilayah tandus dengan luasnya hanya sekitar kurang lebih 1.29 km<sup>2</sup>. Dengan kondisi alam yang tidak subur dan tandus serta sempit tersebut

mengapa kedua negara tersebut sangat berkompetingan hingga melibatkan pasukan militer untuk merebutnya dari satu sama lain karena, lokasi Ras Doumeira yang terletak di laut Merah yang merupakan jalur perdagangan internasional. Dimana dalam perkembangan ekonominya kedua negara sama-sama berkeinginan menjadi negara transit kapal-kapal besar dan menjadi negara pariwisata di Afrika Timur.

Selain itu ada pula faktor yang mendorong terjadinya konflik perbatasan di Ras Doumeira antara Eritrea dengan Djibouti pada tahun 2008. Konflik tersebut terjadi karena kedua negara mengalami *security dilemma* dimana kedua negara mengerahkan kekuatan militer dan potensi yang ada untuk mempertahankan kepentingannya masing-masing.

Konflik terjadi diperparah dengan sikap dari kedua negara yang tidak berupaya berdamai namun defensif terhadap kepentingan di Ras Doumeira. Dengan maraknya basis militer asing yang ada di Djibouti tentu saja membuat negara tersebut mendapat berbagai keuntungan diantaranya adalah mendapatkan pendapatan dari hasil menyewakan tempat bagi militer asing yang otomatis tentu menjaga kedaulatan negara Djibouti dari gangguan atau tekanan negara tetangganya, serta adanya transfer ilmu dan teknologi dari kerjasama militer antara Djibouti dengan negara-negara tersebut.

Djibouti telah berusaha memanfaatkan keuntungan geografinya untuk menghasilkan mata uang dengan menyewakan lahan ke beberapa militer asing. Djibouti bercita-cita

menjadi pusat komersial seperti Singapura di Afrika Timur. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan perluasan infrastruktur secara dramatis.

Namun disisi lain negara Eritrea merasa terancam dengan keberadaan pangkalan militer asing yang berada di Djibouti. Kondisi tersebut merupakan *security dilemma* dimana keadaan ketika adanya peningkatan atau penurunan keamanan di suatu negara akan berpengaruh terhadap negara lainnya. Eritrea sendiri tidak memiliki basis militer asing yang ada di negaranya, bahkan sejak negara tersebut berjuang meraih kemerdekaannya, Eritrea tidak bekerjasama atau meminta bantuan asing.

Meskipun dalam komposisi penduduk dan anggaran belanja militer Eritrea lebih memadai daripada Djibouti, namun tetap saja keberadaan pangkalan asing di Djibouti membuat Eritrea terus meningkatkan kemampuannya dalam kekuatan militer. Salah satunya adalah melakukan wajib militer dengan durasi yang panjang. Djibouti dengan kemampuan militernya yang cenderung kecil berusaha untuk melindungi wilayahnya sebagai kepentingan mereka. Dan begitu pula dengan Eritrea dengan kemampuan militer yang lebih besar berusaha melindungi Ras Doumeira sebagai bagian dari kepentingannya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Acheson, R. (2016). REMOTE WARFARE AND SEXUAL VIOLENCE IN DJIBOUTI. *Women's International League for Freedom and Peace*, 4.

AfricanUnion. (2008). *Report of the Chairperson of the Commission on the*

- Situation at the Border Between the Republic of Djibouti and the State of Eritrea and Developments in Relations Between the Two Countries.* Charm el Sheikh, Egypt: Presented at Peace and Security Council 140th Meeting.
- Anebo, L. N. (2016). Assessing the Efficacy of African Boundary Delineation Law and Policy : The Case of Ethio-Eritrea Boundary Dispute Settlement. *Golden Gate Univerity School of Law*, 271.
- Azra, A. (2003). *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: PRENADA MEDIA.
- BBC.news. (2017, Juni 20). *What is behind tension between Eritrea and Djibouti?* Retrieved from World Africa: <http://www.bbc.com/news/world-africa-40340210>
- Bereketeab, R. (2010). The Complex Roots of the Second Eritrea-Ethiopia Wars: Re-examine the Causes. *African Journal*, 15-59.
- Christensen, T. ..., & Snyder, J. (1990). *Chain Gangs and Passed Bucks: Predicting Alliance Patterns in Multipolarity*. the World Peace Foundation and MIT.
- COUNCIL, S. (2008, Juni 24). *ADDRESSING SECURITY COUNCIL, DJIBOUTI'S PRIME MINISTER SAYS ERITREA CONTINUES MASSIVE ARMED INCURSION, THREATENING TO PUSH BOTH SIDES INTO FRATRICIDAL WAR*. Retrieved from MEETINGS COVERAGE AND PRESS RELEASES: <http://www.un.org/press/en/2008/sc9372.doc.htm>
- Daily, E. (2018, Maret 11). *Eritrea not to cross an inch into the territory of Djibouti*. Retrieved from Eritrea Daily: <http://www.eritreaddaily.net/News0108/article0804271.htm>
- DurhamUniversity. (2010, Juni 10). *Djibouti and Eritrea agree to boundary mediation with Qatar*. Retrieved from Boundary news: <https://www.dur.ac.uk/ibru/news/bo>
- undary\_news/?itemno=10205&rehref=%2Fibru
- Gaffey, C. (2017, Desember 6). *AFRICA'S NORTH KOREA : REPORTING FROM ERITREA, THE LAND OF NO JOURNALIST*. Retrieved from Newsweek: <http://www.newsweek.com/eritrea-north-korea-press-freedom-isaias-afwerki-623641>
- Hadiwijoyo, S. S. (2008). *Batas Wilayah Negara Indonesia : Dimensi, Permasalahan, Dan Strategi Penanganan, Sebuah Tinjauan Empiris dan Yuridis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Harb, M., & Mesere, E. (2017, Juni 14). *Qatar pulls all its troops from Djibouti-Eritrea border*. Retrieved from The Deroit news: <https://www.detroitnews.com/story/news/world/2017/06/14/qatar/102842216/>
- Herz, J. H. (1950). Idealist Internationalism and the Security Dilemma. *World Politics vol. 2, no. 2*, 157 - 180.
- Ibrahim, M. (2018, Maret 30). *Methodology*. Retrieved from Mo Ibrahim Foundation: <http://mo.ibrahim.foundation/iiag/methodology/>
- Jatmika, S. (2016). *Hubungan Internasional di Kawasan Afrika*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Jervis, R. (1978). Cooperation under the Security Dilemma. *World Politics vol. 30, no.2*, 167-174.
- Mesfin, B. (2008). The Eritrea-Djibouti border dispute. *Institute for Security Studies : Situation Report*, 2.
- Nafi, D. (2018, Maret 17). *Penjajahan Italia di Afrika*. Retrieved from Sejarah Umum: <https://www.sejarahumum.com/2017/11/penjajahan-italia-di-afrika.html>
- Nasution, D. (1991). *POLITIK INTERNASIONAL (KONSEP DAN TEORI)*. Penerbit ERLANGGA.

- Nyende, M., & Mugisha, F. (2017). Eritrea 2017. *AFRICAN ECONOMIC OUTLOOK*, 1.
- Setiawan, S. (2016, November 22). 14 *Pengertian Konflik Menurut Para Ahli*. Retrieved from Guru Pendidikan: [www.gurupendidikan.co.id/14-pengertian-konflik-menurut-para-ahli-terlengkap/](http://www.gurupendidikan.co.id/14-pengertian-konflik-menurut-para-ahli-terlengkap/)
- seychellesnewsagency.com. (2017, Juni 18). *AU calls for calm as Djibouti-Eritrea border tensions mount*. Retrieved from seychelles news agency: <http://www.seychellesnewsagency.com/articles/7444/AU+calls+for+calm+as+Djibouti-Eritrea+border+tensions+mount>
- Siahaan, H. T. (2013). *Pandangan Paradigma Neorilisme, Neoliberalisme, dan Konstruktivisme dalam Melihat Akar Konflik pada Konflik Perbatasan Djibouti-Eritrea di Daerah Ras Doumeira Tahun 2008*. Depok.
- Simon, I.-V. (2011). *Tracer des frontières à Djibouti : Des territoires et des hommes aux xix<sup>e</sup> et xx<sup>e</sup> siècles*. *Karthala*, 479.
- States, T. G. (2017, Oktober 17). *UiO University of Oslo*. Diambil kembali dari University of Oslo : The Faculty of Law: [www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/01/1-02/rights-duties-states.xml](http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/01/1-02/rights-duties-states.xml)
- Styan, D. (2013). *Djibouti: Changing Influence in the Horn's Strategic Hub*. *Chatham House*, 4.
- Times, N. Y. (2018, Maret 11). *A Conflict's Buffer Zone : Rocks and Inches*. Retrieved from New York Times: <http://www.nytimes.com/2008/05/25/world/africa/25djibouti.html>
- Uwechue, R. (1977). *Africa year book and who's who*. *Africa Journal Ltd*, 209.
- Whitlock, C. (2012, Juni 13). *U.S. expands secret intelligence operations in Africa*. Retrieved from The Washinton Post: [https://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-expands-secret-intelligence-operations-in-africa/2012/06/13/gJQAHyvAbV\\_story.html?utm\\_term=.d24a71dd8ee1](https://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-expands-secret-intelligence-operations-in-africa/2012/06/13/gJQAHyvAbV_story.html?utm_term=.d24a71dd8ee1)
- Wisnu, D. (2017, Juli 19). *Djibouti dan Pangkalan Militer Asing*. Retrieved from SINDO NEWS: <https://nasional.sindonews.com/read/1221893/18/djibouti-dan-pangkalan-militer-asing-1500390380>
- Wolfenbarger, S., Drake, J., & Ashcroft, E. (2015). *Monitoring Border Conflict with Satellite Imagery : Djibouti and Eritrea - 2008*. Washinton, D.C.: American Association for the Advancement of Science Geospatial Technologies Project Scientific Responsibility, Human Rights, and Law Program.
- Zaken, M. v. (2017). *Country of Origin Information Report on*. The Hague: MFA's Directorate for Sub-Saharan Africa.